BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat, seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini, pesatnya perkembangan penduduk dan kegiatan ekonomi tidak dapat ditampung karena keterbatasan ruang sehingga wilayah administratif kota Pekanbaru diperluas menjadi 446,5 Km², melalui peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 1987. Setelah dilakukan pengukuran oleh kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, ternyata luas wilayah sebagaimana ditetapkan pada peraturan tersebut diatas adalah 632,26 Km².

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di kota Pekanbaru disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

1. Fungsi kota yang merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, jasa, industri dan maskapai asing.
2. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru.
3. Tingginya urbanisasi yang datang di Kota Pekanbaru.
4. Merupakan daerah lintas antar provinsi yang mengakibatkan banyak pendatang di Kota Pekanbaru.
5. Perkembangan perkebunan di hinterland kota.

Jumlah penduduk yang bermukim di kawasan barat dan selatan kota sekitar 70% dari total jumlah penduduk, sedangkan dikawasan utara dan timur

kota hanya sekitar 30%. Hal ini disebabkan karena pembangunan kota selama ini lebih terkonsentrasi dikawasan barat dan selatan kota pekanbaru.

Masalah kependudukan tidak hanya menyangkut jumlah dan kepadatan penduduk ataupun angka kelahiran dan kematian tetapi juga meliputi perencanaan pembangunan disegala bidang. Todaro (1983), oleh karena itu yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi disamping peningkatan taraf hidup dan pemenuhan kebutuhan pokok, juga menghapuskan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja dan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat.

Sumarwoto (1981) mensinyalir bahwa beberapa proyek pembangunan hanya memberikan manfaat kepada golongan masyarakat kuat yang berada di luar proyek pembangunan di pihak lain golongan masyarakat lemah yang berada disekitar proyek tetap hidup miskin, karena mereka tidak dapat mengambil manfaat yang ditimbulkan oleh proyek. Masalah ini perlu mendapat perhatian agar usaha pemerataan pembangunan dapat dicapai.

Masalah lain yang ditemukan adalah tingginya laju pertumbuhan angkatan kerja, untuk menampung laju pertumbuhan angkatan kerja yang cenderung semakin meningkat, maka perlu dikembangkan sektor-sektor ekonomi baru diluar pertanian yang diharapkan dapat menampung pertumbuhan angkatan kerja tersebut. Salah satu sektor yang diharapkan kehadirannya adalah sektor industri, terutama industri kecil yang cocok dikembangkan didaerah pedesaan dan daerah pinggiran kota.

Dengan berkembangnya industri berskala kecil diharapkan dapat mengatasi kemiskinan dan pengangguran sehingga terwujud unsur pemerataan dalam proses pembangunan.

Menyadari akan pentingnya kedudukan industri kecil maka pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya untuk membina dan mengembangkannya dalam pelita lima ada beberapa jenis industri yang dipacu perkembangannya antara lain :

1. Industri untuk pemenuhan kebutuhan pokok rakyat (dicakup dalam aneka industri).
2. Industri yang menghasilkan mesin-mesin industri serta penyediaan bahan baku dan bahan penolong.
3. Industri yang memanfaatkan sumber alam dan energi (dicakup dalam industri kimia dasar).
4. Industri kecil dan kerajinan rakyat dalam upaya mewujudkan pemerataan berusaha.

Industri kecil dan kerajinan rumah tangga telah lama berkembang di Provinsi Riau yang tersebar pada daerah Kota dan Kabupaten. Pada mulanya setiap produksi hanya menghasilkan barang untuk kebutuhan lokal namun akhirnya terjadi perluasan fungsi, disamping untuk kebutuhan lokal juga ditujukan untuk kebutuhan nasional bahkan untuk kebutuhan internasional.

B. Perumusan Masalah

Dalam proses pembangunan Indonesia sampai saat ini masih menghadapi masalah perluasan kesempatan kerja. Hal ini disebabkan karena masih tingginya laju pertumbuhan angkatan kerja, sedangkan di pihak lain kemampuan sektor-sektor non pertanian masih terbatas untuk itu upaya dan kebijaksanaan pengembangan industri kecil yang pada umumnya berlokasi di pedesaan dan pinggiran kota sangat diharapkan sekali. Dengan berkembangnya sektor industri pada suatu wilayah akan memungkinkan wilayah tersebut dapat mengekspor barang dan jasa keluar wilayahnya. Mekanisme ini pada akhirnya dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Bertitik tolak dari latar belakang dan masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

Bagaimanakah dampak industri kecil terhadap pembangunan Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh industri kecil terhadap pendapatan Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengembangkan industri kecil.

Kegunaan Penelitian :

1. Menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ekonomi.

2. Sebagai bahan informasi bagi para pengambil kebijaksanaan dalam perencanaan pengembangan industri kecil dan kerajinan rumah tangga.
3. Dapat memberikan informasi didalam penyusunan perencanaan pengembangan wilayah khususnya di Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

Pada mulanya industrialisasi itu diartikan sebagai suatu proses pembangunan industri modern yang berskala besar. Namun sekitar tahun 1960-an, pola pemikiran ini mulai berubah, dimana perhatian terhadap eksistensi dan peranan industri berskala kecil semakin meningkat. Dua pola pemikiran mulai menampakkan diri sebagaimana dilukiskan oleh Myrdal : Pertama, ideologi industrialisasi yang ingin melihat terjadinya revolusi melalui pengembangan industri modern. Kedua, ideologi industrialisasi yang lebih menghendaki dipelihara dan dikembangkannya bentuk-bentuk ekonomi tradisional. Dalam hal ini termasuk di dalamnya industri kecil dan kerajinan rumah tangga (Riharjo, 1996).

Mochtar Lubis (dalam Erawan, 1985) mengemukakan bahwa industrialisasi merupakan proses peningkatan nilai tambah berbagai bahan mentah dari sumber-sumber alam, yang diproses menjadi barang jadi. Dari segi ini dapat dikatakan bahwa industrialisasi merupakan usaha peningkatan peranan sektor industri baik industri besar, sedang dan kecil serta kerajinan rumah tangga.

Perhatian terhadap pembinaan dan pengembangan industri berskala kecil semakin meningkat setelah terjadinya stagnasi ekonomi di pedesaan yang ditandai

oleh terjadinya pengangguran dan kemiskinan disana. Hal ini diduga karena industri berskala kecil dianggap sebagai salah satu sektor yang potensinya cukup besar menciptakan kesempatan kerja dan sumber penghasilan bagi kelompok masyarakat miskin yang pada umumnya berada di pedesaan (Tambunan, 1989).

Irsan Azhari Saleh (2000), mengemukakan bahwa eksistensi industri kecil cukup penting dalam pembangunan suatu wilayah, justru itu sektor ini perlu dikembangkan yang didasari atas beberapa pemikiran pokok yaitu : Pertama, industri kecil dan kerajinan rumah tangga berlokasi dipedesaan, sehingga pengembangan sektor ini diduga merupakan suatu alternatif yang baik dalam upaya menampung laju pertumbuhan angkatan kerja yang semakin meningkat di pedesaan. Kedua, industri kecil menggunakan bahan baku yang dapat disediakan di lingkungan terdekat dan biaya produksi dapat disediakan seminimal mungkin karena tingkat upah yang rendah. Ketiga, Harga jual yang relatif rendah dan adanya permintaan terhadap beberapa jenis komoditi yang tidak dapat diproduksi dengan mesin secara maksimal, merupakan suatu aspek pendukung yang kuat.

Dilihat dari segi pertumbuhan, eksistensi industri kecil memang melahirkan suatu kontroversi, karena untuk tujuan pertumbuhan, maka industri berskala besar yang lebih diharapkan. Namun perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan industri besar akan membawa implikasi terhadap kaburnya aspek pemerataan. Raharjo (1986) mengemukakan bahwa dilihat dari aspek pemerataan maka ada beberapa dasar pemikiran yang melandasi perlu dikembangkannya industri berskala kecil antara lain : Pertama , industri kecil tidak membutuhkan

yang besar dan dengan teknologi yang sederhana. Kedua , industri kecil memiliki keterkaitan yang erat dengan mata pencaharian pertanian di pedesaan dan sektor ini juga dapat menghasilkan barang-barang atau suku cadang yang dibutuhkan oleh industri besar. Dasar pemikiran ini secara ekonomi cukup rasional, setidaknya industri kecil memperoleh tempat dalam pertumbuhan untuk pemerataan kesempatan berusaha baik secara rasional maupun secara sektoral.

Pada hakekatnya pembangunan wilayah (Regional Development) merupakan pelaksanaan dari pembangunan nasional pada wilayah tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan fisik, sosial ekonomi wilayah tersebut serta harus tunduk pada peraturan yang berlaku.

Ketimpangan pembangunan di Indonesia selama ini berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk, aspek, atau dimensi. Bukan saja berupa ketimpangan hasil-hasilnya, misalnya dalam hal pendapatan perkapita, tetapi juga ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Bukan pula semata-mata berupa ketimpangan spasial atau antar daerah, yakni antar daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Akan tetapi juga berupa ketimpangan sektoral dan ketimpangan regional.

Upaya untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan yang terjadi, menurut beberapa kalangan, sebetulnya sudah mulai dirintis sejak awal pelita III. Ketika itu urutan trilogi pembangunan dirasionalisasikan dengan menempatkan pemerataan sebagai prioritas pertama.

Ketimpangan sektoral dan ketimpangan regional dalam pembangunan dapat ditengarai antara lain dengan menelaah perbedaan mencolok dalam aspek-

aspek seperti penyerapan tenaga kerja; alokasi dana perbankan; investasi dan pertumbuhan.

Ketimpangan pertumbuhan antarsektor bukan saja terjadi pada masa lalu sejak Pelita I hingga Pelita V. Akan tetapi juga memang "direncanakan" untuk masa-masa yang akan datang. Ketimpangan sektoral dalam aspek pertumbuhan ini sangat mencolok apabila kita membandingkan sektor pertanian dengan sektor industri pengolahan.

Ketimpangan pertumbuhan [dan penumbuhan] antarsektor, khususnya antara sektor pertanian dan sektor industri pengolahan, harus dipahami secara arif. Ketimpangan pertumbuhan sektoral ini bukanlah "kecelakaan" atau akses pembangunan. Ketimpangan ini lebih merupakan sesuatu yang disengaja atau memang terencana.

Berkenaan dengan ketimpangan pertumbuhan sektoral, persoalan yang lebih mendasar jika memang dirasa perlu untuk dipersoalkan bukanlah ada tidaknya ketimpangan. Juga tak perlu dipertanyakan lagi perihal tepat tidaknya penetapan industrialisasi sebagai jalur pembangunan yang dipilih. Hal itu sudah mejadi kesepakatan nasional.

Hingga saat ini terlihat masih berlangsungnya kesenjangan kesejahteraan antara orang-orang desa dengan orang-orang kota. Bahkan untuk beberapa variabel atau indikator, sekalipun skor kesejahteraannya mengisyaratkan adanya perbaikan, perbedaan itu cukup mencolok. Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melek-huruf lebih besar di kota daripada di desa. Semua ini cukup

untuk membuktikan betapa masih memprihatinkan kesenjangan sosial antara masyarakat desa dan masyarakat kota.

Ketidakmerataan atau ketimpangan atau kesenjangan- diukur dengan berbagai variabel serta dalam berbagai dimensi agaknya merupakan fenomena atau produk sampingan yang tak terelakkan dalam PJP I. Ketimpangan-ketimpangan yang ada bersifat majemuk dan berskala nasional.

Kesejahteraan atau keadaan tidak miskin merupakan keinginan lahiriyah setiap orang. Keadaan semacam ini, akan tetapi, barulah sekedar memnuhi kepuasan hidup manusia sebagai makhluk individu. Padahal, disamping sebagai makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakatnya. Dalam kapasitas sebagai makhluk sosial ini, manusia membutuhkan "kebersamaan" dengan manusia-manusia lain di dalam masyarakatnya. Kesetaraan kemakmuran, dalam arti perbedaan yang ada tidak terlalu mencolok, merupakan salah satu sarana yang memungkinkan orang-orang bisa hidup bermasyarakat dengan baik dan tenang, tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Kemerataan sama pentingnya dengan kemakmuran. Pengurangan ketimpangan atau kesenjangan sama pentingnya dengan pengurangan kemiskinan.

E. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian ini maka lokasi penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru karena merupakan salah satu daerah dimana industri kecil cukup berkembang. Pemilihan lokasi dilakukan secara sensus sampling. Hal ini didasari atas pemikiran bahwa semua kecamatan merupakan daerah produsen usaha industri kecil.

2. Jenis dan sumber data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara secara langsung kepada *key informants* khusus untuk keperluan penelitian ini. Sedangkan data skunder dikumpulkan secara langsung melalui laporan dan potensi wilayah dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta jawatan lain yang erat kaitannya dengan lingkup penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi, yaitu : Dalam hal ini penulis langsung turun ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.
- b. Interview, yaitu : Melakukan tanya jawab dengan *key informants* untuk menjelaskan hal-hal yang diperlukan didalam penelitian ini.

4. Analisis data

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data penelitian ini adalah setelah data dan informasi dikumpulkan, selanjutnya di klasifikasikan menurut jenisnya sesuai dengan keperluan.

Untuk mengetahui dampak industri kecil terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di Kota Pekanbaru, digunakan analisis multiplier pendapatan jangka pendek dengan persamaan

$$MS = \frac{1}{1 - \left(\frac{YN}{YN + YB} \right)}$$

MS = Multiplier pendapatan jangka pendek

Y = Total pendapatan wilayah Kota Pekanbaru

YN = Pendapatan Non Basis

YB = Pendapatan sektor basis